

DAFTAR ISI

PERNYATAAN.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	17
1.3. Tujuan Penelitian	17
1.4. Manfaat Penelitian.....	17
1.4.1. Manfaat Teoritis.....	17
1.4.2. Manfaat Praktis.....	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	19
2.1. Landasan Teoritis.....	19
2.1.1. Konflik.....	19
2.1.2. Konflik Sumber Daya Alam.....	25
2.1.4. Implementasi Kebijakan Publik	33
2.2. Kerangka Pemikiran	37
BAB III METODE PENELITIAN.....	40
3.1. Metode Penelitian	40
3.2. Fokus Penelitian	42
3.3. Penentuan Informan.....	42
3.4. Teknik Pengumpulan Data.....	43
3.4.1. Wawancara.....	44
3.4.2. Observasi	45
3.4.3. Studi Dokumentasi.....	45
3.5. Pengolahan dan Analisis Data.....	46
3.5.1. Validitas Data.....	46
3.5.2. Metode Analisis Data.....	47
3.6. Lokasi dan Jadwal Penelitian	49

3.6.1. Lokasi Penelitian	49
3.6.2. Jadwal Penelitian	50
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	52
4.1. Gambaran Umum	52
4.1.1. Profil Kabupaten Tasikmalaya	52
4.1.2. Profil Desa Puspamukti	55
4.1.4. Profil Cabang Dinas Kehutanan Wilayah VI Tasikmalaya	61
4.1.5. Profil Perum Perhutani KPH Tasikmalaya	65
4.1.6. Karakteristik Informan.....	70
4.2. Hasil Penelitian Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemanfaatan Lahan Hutan...	72
4.2.1. Regulasi Tata Kelola Lahan Hutan.....	72
4.2.2. Transformasi Kebijakan Pengelolaan Lahan Hutan di Pulau Jawa.....	80
4.2.3. Implementasi Transformasi Kebijakan Pengelolaan Lahan Hutan	91
4.2.4. Dinamika Aktor dan Akar Konflik.....	108
4.2.5. Dinamika Transformasi Kebijakan Pengelolaan dan Pemanfaatan Lahan di Pulau Jawa	123
4.3. Pembahasan Pelaksanaan Pengelolaan Lahan Hutan di Pulau Jawa.....	133
4.3.1 Analisis Kasus dengan Pendekatan Ekologi Politik	133
4.3.2 Kerangka Ekologi Politik terhadap KHDPK.....	135
4.3.3 Pembacaan Ekologi Politik Terhadap Transformasi Tata Kelola Hutan Jawa .	137
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	151
5.1. Kesimpulan.....	151
5.2. Saran.....	153
DAFTAR PUSTAKA	155

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Sumber Daya Alam dan Penyebab Konflik.....	26
Tabel 4. 1 Jumlah RT dan RW Setiap Dusun Desa Puspamukti.....	55
Tabel 4. 2 Komposisi Penduduk Berdasarkan Umur dan Jenis Kelamin.....	56
Tabel 4. 3 Komposisi Penduduk Desa Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	58
Tabel 4. 4 Komposisi Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian.....	59
Tabel 4. 5 Daftar Sarana dan Prasarana Desa Puspamukti.....	60
Tabel 4.6 Lembaga Penyuluhan dan Desa Sekitar Hutan.....	64
Tabel 4.7 Karyawan Berdasarkan Jenjang Jabatan.....	69
Tabel 4.8 Tingkat Pendidikan Karyawan Perhutani.....	70
Tabel 4.9 Luas Area Hutan Provinsi di Pulau Jawa.....	87

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran.....	39
Gambar 3. 1. Komponen Metode Analisis Data Model Interaktif Miles dan Huberman.....	48
Gambar 4.1 Peta Administratif Kabupaten Tasikmalaya.....	52
Gambar 4. 2 Struktur Organisasi Cabang Dinas Kehutanan (CDK) Provinsi Jawa Barat Wilayah VI.....	62
Gambar 4.3 Luas Lahan Kritis di CDK Wilayah VI.....	64
Gambar 4.4 Korelasi Kebijakan.....	74
Gambar 4.5 Transformasi Kebijakan Hutan Jawa.....	84
Gambar 4.6 Transformasi Tata Kelola Hutan Jawa Pasca KHDPK	89
Gambar 4.7 Model Implementasi Kebijakan Menurut Edward III.....	105

ABSTRAK

Persoalan mengenai banyaknya lahan kritis saat ini menjadi isu lingkungan yang perlu ditangani. Lahan kritis, mempengaruhi kondisi lingkungan dan sosial masyarakat. Transformasi kebijakan tata kelola hutan Jawa menjadi salah satu upaya pemerintah dalam menyelamatkan Hutan Jawa. Transformasi kebijakan ini tentunya akan berpengaruh kepada berbagai proses kegiatan pemanfaatan hutan baik yang sudah berjalan ataupun belum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana para aktor berinteraksi dalam proses transformasi kebijakan serta melihat realita di lapangan untuk mengetahui hal apa saja yang menjadi hambatan serta tantangan.

Pada penelitian ini menggunakan berbagai landasan teoritis yang berguna untuk mengetahui bagaimana alur dan proses sebuah Sumber Daya Alam dapat menimbulkan potensi suatu konflik. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus dengan teknik penetapan informan yakni informan pangkal dan informan kunci. Teknik pengumpulan data terbagi ke dalam beberapa sumber yakni sumber primer dan juga sumber sekunder. Selain itu, pengambilan data juga melalui wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya, pengolahan dan analisis data yang telah dikumpulkan kemudian direduksi dan kemudian disajikan agar dapat lebih memahami arah serta alur yang terjadi pada proses penelitiannya serta ditarikny kesimpulan pada penelitian ini.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa potensi konflik terjadi pada proses implementasi kebijakan Perhutanan Sosial di Desa Puspamukti. Tidak selarasnya pemahaman antar masyarakat yang telah lama mengelola lahan hutan dengan masyarakat yang mendapatkan akses legal pengelolaan hutan melalui KHDPK memunculkan gesekan sosial. Perlu adanya persiapan dan sosialisasi yang matang dalam proses pelaksanaan kebijakan ini, selain itu dalam penentuan lahan hutan yang akan digarap tidak cukup dilihat melalui aspek administrasi saja, aspek historis pun perlu menjadi pertimbangan. Dengan adanya temuan tersebut maka perlu adanya kejesalan yang diberikan pada masyarakat akan kebijakan ini, agar tidak ada masyarakat yang merasa dirugikan dan kebijakan dapat berjalan dengan efektif dan efisien serta menghasilkan konsensus dan kemaslahatan baik dalam prosesnya maupun hasil yang diberikan.

Kata Kunci: Hutan Jawa, Pengelolaan Lahan, *Perhutanan Sosial*, Transformasi Kebijakan, Potensi Konflik.

ABSTRACT

The issue of the large number of critical lands is currently an environmental issue that needs to be addressed. Critical lands affect the environmental and social conditions of the community. The transformation of Java's forest governance policy is one of the government's efforts to save Java's Forest. This policy transformation will certainly affect various forest utilization activities, both those that are already running and those that are not. This study aims to determine how actors interact in the policy transformation process and to see the reality in the field to find out what are the obstacles and challenges.

This study uses various theoretical foundations that are useful for determining how the flow and process of a Natural Resource can cause potential conflict. The method used is descriptive qualitative research with a case study approach with informant determination techniques, namely base informants and key informants. Data collection techniques are divided into several sources, namely primary sources and secondary sources. In addition, data collection is also through interviews and documentation. Furthermore, the processing and analysis of the data that has been collected is then reduced and then presented in order to better understand the direction and flow that occurs in the research process and conclusions are drawn in this study.

The results of this study indicate that the potential for conflict occurs in the process of implementing the Social Forestry policy in Puspamukti Village. The misalignment of understanding between communities that have long managed forest land with communities that have legal access to forest management through KHDPK has given rise to social friction. There needs to be thorough preparation and socialization in the process of implementing this policy, in addition, in determining the forest land to be worked on, it is not enough to see it through administrative aspects alone, historical aspects also need to be considered. With these findings, there needs to be an explanation given to the community about this policy, so that no community feels disadvantaged and the policy can run effectively and efficiently and produce consensus and benefits both in the process and the results provided.

Keywords: *Java Forest, Land Management, Social Forestry, Policy Transformation, Conflict Potential.*